

PENGEMBANGAN APLIKASI PENILAIAN PERFORMA PNBP FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Moh. Hatta Hasanudin, Atika Eka Lutfianingrum, Galuh Rafi Anindita, Ulfa Rofi'Anita

KPPN Balikpapan

Abstract

In the management of Non-Tax State Revenue (PNBP), Directorate General of Treasury (Ditjen Perbendaharaan), through its regional offices (Kantor Wilayah DJPb), has a role in terms of monitoring and evaluation PNBP performance in Ministries/Agencies within its working areas. However, at this moment, there is no tools to assist Kanwil DJPb in providing information as a proper guidance to select Ministries/Agencies but merely rely on the comparison of target and realized PNBP. This study aims to propose a design of tools that able to assess PNBP within Ministries/Agencies using three ratios: Effectivity Ratio, Growth Ration, and Performance Ratio. The result of this study is design-documentation of application, "Assessing performance of Functional PNBP on Ministries/Agencies". This application is expected to support regional office if DG of Treasury in analyzing the performance of PNBP units within its working area.

Abstrak

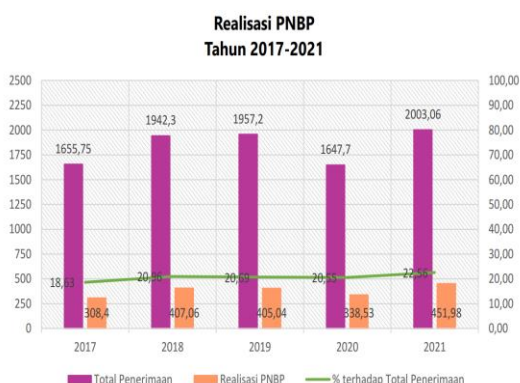
Dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan berperan dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNBP pada satuan kerja pengelola PNBP di wilayah kerjanya. Namun saat ini, dalam pelaksanaannya belum diberikan *tools* atau sarana yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui performa kinerja capaian PNBP K/L yang selanjutnya akan dipilih untuk dilakukan monitoring dan evaluasi melainkan sebatas perbandingan antara pagu dan realisasi. Penelitian ini mengusulkan rancangan sebuah *tools* yang akan menyediakan penilaian dengan system pembobotan menggunakan tiga rasio yang mempengaruhi performa PNBP, yaitu : Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Pencapaian. Rasio Efektivitas menilai PNBP dari realisasi dan target penerimaan, Rasio Pertumbuhan menilai PNBP dari pertumbuhan realisasi penerimaan, dan Rasio Pencapaian didapatkan dari perbandingan capaian realisasi dengan realisasi harapan penerimaan PNBP yang dihitung menggunakan regresi dari PNBP dan PDRB sektor usaha. Hasil penelitian ini adalah dokumen perancangan dan aplikasi "Penilaian Capaian PNBP Fungsional Kementerian/Lembaga". Tersedianya *tools* ini diharapkan akan membantu Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam menganalisa kinerja capaian satker PNBP di wilayah kerjanya.

Keywords: PNBP, Fungsional, aplikasi, Ditjen Perbendaharaan, Monitoring dan Evaluasi, Kementerian/Lembaga.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu elemen pembangun bangsa melalui berbagai sektor perekonomian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bagian penting yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disamping penerimaan yang bersumber dari perpajakan. Di Amerika Serikat pun, PNBP berperan cukup besar sebagaimana penjelasan Gilles Mourre (2019) dalam jurnalnya bahwa PNBP turut menyumbang setidaknya sebesar 10% dari total pendapatan negara atau 5% dari total *Gross Domestic Product* (GDP). Selain itu, pertumbuhannya pun semakin naik dari tahun ke tahun hingga rata-rata 4% per tahunnya, jauh lebih besar dibanding perpajakan yang hanya 2,75% per tahun dalam dekade terakhir. Hal tersebut selaras dengan kondisi PNBP di Indonesia, bahkan porsiya terhadap total penerimaan APBN lebih besar di banding Amerika Serikat sebagaimana tercermin pada grafik 1.1.

Grafik 1.1 Realisasi PNBP K/L di Indonesia dari tahun 2017-2021



Grafik 1.1 menunjukkan tren realisasi PNBP selama lima tahun terakhir seluruh K/L di Indonesia. Realisasi PNBP dari tahun ke tahun

menunjukkan pergerakan yang fluktuatif dan mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Namun di tahun 2021, dengan kondisi yang lebih stabil, realisasi PNBP meningkat dan membukukan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir sebesar Rp 451,98 triliun, meningkat 31,46% dibandingkan realisasi tahun 2020. Dari data grafik menunjukkan bahwa PNBP setidaknya menyumbang rata-rata sebesar 20,68% terhadap penerimaan negara selama lima tahun terakhir.

Sejalan dengan eksistensi PNBP sebagai komponen penting dalam penerimaan negara, dibutuhkan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai target penerimaan secara nasional. Selain untuk memenuhi target PNBP yang telah ditetapkan, pengelolaan terhadap PNBP juga dimaksudkan agar kinerja Kementerian/Lembaga (K/L) pengelola PNBP lebih maksimal dan dapat dilakukan evaluasi secara berkala.

Dari sisi pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada satker pengelola dana PNBP, terdapat peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan di daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun saat ini, dalam pelaksanaannya yang dilakukan secara Semesteran, belum diberikan *tools* atau sarana yang dapat

digunakan sebagai acuan untuk mengetahui performa kinerja capaian PNBP K/L yang selanjutnya akan dipilih untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Data yang diperoleh sebelumnya hanya sebatas perbandingan antara realisasi PNBP dengan target yang ditetapkan yang disediakan dalam aplikasi Online Monitoring – Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

Tulisan ini mengakomodasi ketersediaan *tools* tersebut dengan menggunakan sistem pembobotan berdasarkan 3 (tiga) indikator penilaian capaian PNBP, yakni: Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan, serta Rasio Pencapaian. Melalui Rasio Efektivitas, kita akan dapat menilai capaian realisasi PNBP Fungsional terhadap target yang ditetapkan pada suatu periode. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja instansi/unit pengelola penerimaan (Ulum MD, 2012; Sudaryono et.al, 2017). Indikator selanjutnya adalah Rasio Pertumbuhan dengan merujuk pada *paper* Mahmudi (2019) yang menyebutkan bahwa analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah pusat/daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Sedangkan rasio terakhir adalah Rasio Pencapaian dimana kita akan mencoba meregresikan data PDRB per sektor lapangan usaha dan PNBP triwulan masing-masing K/L (periode 2017-2020) dan selanjutnya membandingkan model yang dihasilkan dengan realisasi di periode berkenaan. Jurnal yang menjadi acuan atas rasio tersebut

antara lain, Triani dan Yuli (2010), Adriani & Handayani (2008), dan Juliansyah (2018), yang menggunakan PDRB sebagai variabel independen untuk menilai pendapatan daerah. Namun dari berbagai jurnal yang ditemukan, belum terdapat pengujian atau permodelan yang menggunakan sektor lapangan usaha dalam PDRB sebagai variabel independen tersendiri. Penulis ingin menguji bahwa tidak semua sektor usaha pada PDRB akan berpengaruh pada penerimaan PNBP Fungsional suatu K/L. Setiap K/L mempunyai karakteristik sendiri sehingga PNBP Fungsional yang dikelolanya akan sangat dipengaruhi oleh beberapa sektor lapangan usaha tertentu.

Dari hasil kajian yang telah dilakukan dan tersedianya *tools*, selanjutnya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk :

1. Membantu Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam menentukan K/L yang akan menjadi target monitoring dan evaluasi terkait penerimaan PNBP;
2. Menilai performa K/L atau satuan kerja PNBP di lingkup wilayah kerja;
3. Memberikan masukan asistensi kepada K/L terkait potensi PNBP Fungsional, penentuan besaran target PNBP tahun berikutnya hingga perbaikan penentuan tarif PNBP.

TINJAUAN LITERATUR

Secara garis besar, ada tiga sumber pendapatan dalam APBN, yaitu: Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Pada tahun 2021, realisasi Penerimaan

Perpajakan pada 2021 sebesar Rp 1.277,5 triliun dan merupakan penerimaan paling dominan. Namun demikian, realisasi PNBP menunjukkan pencapaian yang baik dengan mencapai Rp452 triliun atau 151,6 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp298,2 triliun (*kemenkeu.go.id*). Hal ini menunjukkan bahwa PNBP adalah salah satu sumber penerimaan yang memiliki potensi yang besar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Undang-Undang (UU) 9 Tahun 2018 Pasal 1 menyebutkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam Modul Pengelolaan PNBP dari Kementerian Keuangan (Yuniarta, 2012). Jenis PNBP dibagi menjadi dua : Umum dan Fungsional. PNBP Umum merupakan PNBP yang berlaku umum di semua Kementerian Negara/Lembaga seperti : penerimaan hasil penyewaan atau penjualan barang/kekayaan negara, Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara, dan lain-lain. PNBP Fungsional adalah penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian negara/lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya

dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan fungsional tersebut terdapat pada sebagian besar K/L, namun macam dan ragamnya berbeda antara satu K/L dengan K/L lainnya. Hal itu tergantung dengan jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing kementerian negara/ lembaga.

Kementerian/Lembaga memiliki jenis layanan yang menjadi PNBP Fungsional yang tiap jenis layanan diatur dalam Peraturan Pemerintah masing-masing Kementerian/Lembaga. Beberapa contoh dari jenis PNBP yang berasal dari pelayanan pada Kementerian/Lembaga :

Tabel 2. 1 PNBP Fungsional Pada Kementerian/Lembaga

No	Kode K/L	Nama Kementerian/Lembaga	Jenis Layanan PNBP Fungsional
1.	005	MAHKAMAH AGUNG	a. Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan b. Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan c. Pendapatan Ongkos Perkara
2.	006	KEJAKSAAN NEGERI	a. Pembayaran Pengganti Tindak Pidana Korupsi b. Pembayaran Biaya Perkara Tindak Pidana; c. Pembayaran denda Tindak pidana/ d. Uang Rampasan Negara
3.	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	a. Pelayanan Kekonsuleran/ Non Kekonsuleran yang diberikan oleh perwakilan
4.	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	a. Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan TNI
5.	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	a. Biaya terkait layanan pada Sekretariat Jenderal b. Biaya Penagihan Pajak c. Biaya layanan Bea Cukai d. Biaya terkait layanan Lelang
6.	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	a. Biaya terkait layanan pertanian
7.	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	a. Pelatihan Pendidikan dan Sarana b. Teknis pengujian dan kalibrasi c. Inspeksi teknis d. Teknis mesin, konsultasi, dan sertifikasi
8.	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM	Biaya terkait layanan pertambangan
9.	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Biaya terkait layanan transportasi (darat, laut, udara)
10.	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	a. Penerbitan Surat Tanda Registrasi untuk tenaga Kesehatan b. Biaya pelayanan kesehatan
11.	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	a. Penerbitan Izin (Lingkungan, Pencemaran Air, dan Pengelolaan Limbah Berbahaya) b. Jasa Laboratorium
12.	032	KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN	1. Pungutan pengusahaan Perikanan 2. Pelayanan Tambak dan labuh pada Kelas Pelabuhan Perikanan. 3. Pelayanan Dock, pengadaan air, dan Pas a. Pelayanan Penggunaan Kawasan Pelabuhan Perikanan
13.	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	a. Penelitian dan Pengembangan b. Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi c. Pembinaan Usaha Konstruksi d. Pengolahan Data
14.	056	KEMENTERIAN PERTANAHAN	1. Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan 2. Pelayanan Pemeriksaan Tanah 3. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya 4. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan 5. Pelayanan Informasi Pertanahan 6. Pelayanan Lisensi

			7. Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda
15.	060	KEPOLISIAN RI	a. pendapatan penerbitan dan pengesahan STNK (26,8%) b. pendapatan BPKB (23,6%), TNKB (15%), SIM (14,8%). c. Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan (5,5%) d. pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan ke Luar Daerah (2,5%) e. pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (1,8%), serta f. Pendapatan Uji Keterampilan Mengemudi (0,4%)

Sumber : Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Tiap Kementerian/Lembaga

Peran PNBP Fungsional dari tiap Kementerian/Lembaga dipengaruhi berbagai faktor sektor ekonomi yang mendukung. Ulfah, Azizah (2021) mengatakan bahwa PNBP Kepolisian sebagian besar ditopang oleh Pendapatan yang berasal dari kendaraan bermotor. Roby Alexander Sirait (2021) menyatakan realisasi PNBP sektor perikanan dipengaruhi implementasi PNBP pascaproduksi serta sistem kontrak penangkapan ikan. Sektor Informasi dan Komunikasi menjadi salah satu sektor yang memiliki kinerja tertinggi apabila dilihat dari struktur pertumbuhannya secara year on year yang disebabkan oleh kontribusi PNBP Kominfo dalam anggaran PNBP cukup besar (Imam Khadiiqotul Il'mi, 2020).

Adapun, PNBP Fungsional juga memberi pengaruh pada sektor ekonomi Kementerian ATR/BPN merupakan salah satu K/L yang menjadi salah satu penyumbang terbesar setoran PNBP dari sektor layanan. Kontribusi PNBP Kementerian ATR/BPN, sebesar Rp2,1 triliun pada 2016; Rp2,3 triliun pada 2017; Rp2,2 triliun pada 2018; dan Rp2,3 triliun pada 2019; atau rata-rata mencapai kenaikan 2,3% per tahun. (Nova Aulia Bela, 2021)

Tugas Fungsi Kanwil Perbendaharaan dalam Pengelolaan PNBP

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 terbit dalam rangka mewujudkan pengolahan PNBP yang optimal dan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dalam rangka mewujudkan peningkatan layanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktik lapangan masih terdapat permasalahan pengelolaan PNBP pada Kementerian/Lembaga yang cukup beragam.

Guna menjaga kualitas tata kelola PNBP dan peningkatan potensi penerimaan PNBP ke depan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Dirjen Perbendaharaan diamanahi salah satu fungsi yaitu : Pembinaan dan Bimbingan Teknis (Bimtek), serta Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sasaran dari kegiatan monitoring dan evaluasi serta Bimtek pengelolaan PNBP adalah terwujudnya pengelolaan PNBP yang akuntabel dan transparan serta terus meningkatkan kontribusi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi negara melalui penerimaan negara dalam bentuk PNBP. Adapun tujuan dari kegiatan monev serta Bimtek pengelolaan PNBP adalah meyakinkan bahwa seluruh proses dan mekanisme pelaksanaan PNBP berjalan secara optimal dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sering digunakan sebagai indikator yang mewakili besarnya suatu daerah dari sisi pendapatan regional suatu wilayah, dimana semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka akan menunjukkan semakin meningkatnya perekonomian daerah tersebut (Mutiara, 2015). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah dapat diproksikan oleh pertumbuhan PDRB di wilayah tersebut

Unit ekonomi pada PDRB dikelompokkan dalam sektor atau sub sektor ekonomi (lapangan usaha). Dalam hal ini, PDRB dengan Tahun Dasar 2010 (KBLI 2009) menggunakan 17 (tujuh belas) lapangan usaha berdasar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dengan sektor ekonomi/lapangan usaha sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sektor Ekonomi/ Lapangan Usaha pada PDRB

No	Kode	Sektor Lapangan Usaha
1.	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2.	B	Pertambangan dan Penggalian
3.	C	Industri Pengolahan
4.	D	Pengadaan Listrik dan Gas
5.	E	Pengadaan Air
6.	F	Konstruksi
7.	G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil, dan Sepeda Motor
8.	H	Transportasi dan Pergudangan
9.	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10.	J	Informasi dan Komunikasi
11.	K	Jasa Keuangan
12.	L	Real Estate
13.	M, N	Jasa Perusahaan
14.	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
15.	P	Jasa Pendidikan
16.	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17.	R,S,T,U	Jasa Lainnya

Sumber : BPS Dalam Angka 2021

Pengaruh PDRB pada Pendapatan dan PNBP

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah (*ability to pay*). Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan (Evi Andriani, 2018). Dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan Pendapatan pada daerah tersebut (Saragih, 2003).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menjelaskan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan/pendapatan. Abdullah Muid (2015) dalam penelitiannya juga menemukan fakta bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Gresik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga secara positif memberikan pengaruh pada Penerimaan Pajak (Desi Rosalina, 2016; Mu'min Mubarak, 2014; Rahmanta, 2012; Welly Freddi, 2016).

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan Pengaruh PDRB terhadap PNBP Fungsional K/L, dilihat dari PDRB pada per masing-masing sektor usaha. Berdasarkan latar belakang dan landasan teori maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh sektor lapangan usaha pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional Kementerian/Lembaga.

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap suatu pendapatan negara atau daerah antara lain Juliansyah (2018) dan Andriani (2018) yang menunjukkan adanya suatu korelasi positif antara PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Malawati (2020) dalam tulisannya memasukkan PDRB sebagai variable determinan untuk menilai pengaruhnya terhadap PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tetapi secara umum, belum banyak paper yang secara spesifik membahas korelasi antara PDRB dengan PNBP.

Selain itu, dari berbagai paper yang ada, belum terdapat penelitian yang menggunakan sektor-sektor lapangan usaha dalam PDRB sebagai suatu determinan tersendiri untuk menilai pengaruh atau korelasinya terhadap suatu PNBP Fungsional yang melekat pada K/L tertentu. Penelitian ini mencoba menjembatani gap tersebut guna memperkaya studi atas pengaruh PDRB terhadap pendapatan negara, khususnya PNBP Fungsional pada Kementerian/Lembaga.

SUMBER DATA DAN METODE PENELITIAN

1. Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel atau gabungan antara data *time series* dan

cross section. Periode penelitian selama 5 (lima) tahun (2017 – 2021). Kementerian/Lembaga yang memiliki PNBP Fungsional di seluruh Indonesia dan PDRB tahun 2017-2021, sehingga banyaknya per data panel berjumlah kurang lebih 680 data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro dan Supomo, 2002). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari:

- a. Aplikasi OMSPAN dan MPN untuk data PNBP. Data yang akan diolah adalah data realisasi per akun per satker/Bagian Anggaran per Kanwil. Sedangkan periode nya adalah triwulanan 2017-2021.
- b. Badan Pusat Statistik untuk data PDRB. Data PDRB yang diolah adalah PDRB per Lapangan Usaha atas Dasar Harga Kongsan triwulanan periode 2017-2021 seluruh provinsi.

2. Metode

Tools yang akan dibuat, memiliki sistem pembobotan berupa tiga indikator yang memiliki bobot masing-masing, yang bertujuan untuk dapat menilai kinerja capaian PNBP Fungsional pada KL secara terukur. Adapun unsur dan pembobotan pada indikator yaitu:

Tabel 3.1 Indikator Penilaian Kinerja K/L PNBP Fungsional

No	Indikator	Bobot Penilaian
1	Rasio Efektivitas Rasio antara realisasi target PNBP Fungsional K/L	50%
2	Rasio Pertumbuhan Rasio pertumbuhan realisasi PNBP Fungsional K/L	30%
3	Rasio Pencapaian Rasio capaian realisasi PNBP Fungsional K/L dibandingkan dengan realisasi harapan	20%
TOTAL		100%

a. Analisis Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output (Ahmad Ali Syahputra, 2020). Rasio Efektivitas menilai capaian realisasi PNBP Fungsional terhadap target yang ditetapkan pada suatu periode. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah (Ulum MD, 2012:31-32). Untuk rumus perhitungan rasio efektivitasnya adalah:

$$= \frac{\text{Realisasi PNBP Fungsional K/L}}{\text{Target Realisasi PNBP Fungsional K/L}} \times 100\%$$

Untuk kriteria penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tabel Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Nilai	Keterangan
> 100	100	Sangat Efektif
100	100	Efektif
99 – 89	99 – 89	Cukup Efektif
89 – 79	89 – 79	Kurang Efektif
< 79	< 79	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2010:142)

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan pendapatan merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja pendapatan

selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan ini penting untuk mengetahui sejarah perkembangan kinerja pendapatan pada daerah tersebut. (Mahmudi, 2016:91).

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk menilai apakah Kementerian/Lembaga dalam tahun anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Pertumbuhan dikatakan positif jika menunjukkan peningkatan dalam pertumbuhan, begitu sebaliknya. (Fikri, 2020). Untuk pertumbuhan pendapatan dapat dihitung dengan rumus berikut:

Pertumbuhan Pendapatan Tahun t:

$$= \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t - 1)}{\text{Pendapatan Th } (t - 1)} \times 100\%$$

Keterangan :

Th t : Tahun yang dihitung

Th (t – 1) : Tahun sebelumnya

Sumber : Mahmudi (2010:162)

Untuk kriteria penilaian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.4 Tabel Kriteria Penilaian Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan (%)	Nilai	Keterangan
≥ 100	100	Sangat Baik
50 – 99	80	Baik
26 – 50	70	Cukup
0 – 25	60	Kurang Baik
< 0	50	Tidak Baik

c. Analisis Pencapaian PNBP

Analisis Pencapaian PNBP merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengetahui capaian PNBP dengan membandingkan antara nilai riil realisasi PNBP pada tahun anggaran dengan nilai harapan (*expected*). Untuk perhitungan rasio

pencapaian PNBP dapat dihitung dengan rumus (Yunica, 2014) :

$$= \frac{\text{Nilai Realisasi Riil (Actual) PNBP}}{\text{Nilai Realisasi Harapan (Expected) PNBP}} \times 100\%$$

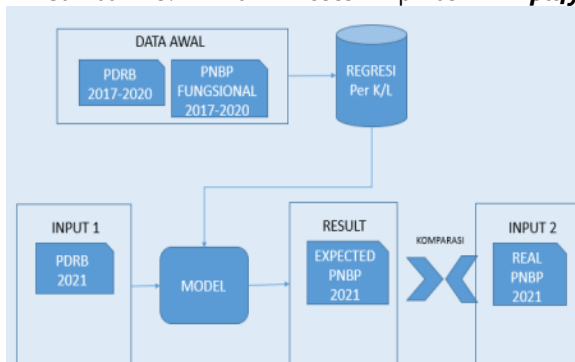
Untuk kriteria penilaian dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.5 Tabel Kriteria Penilaian Rasio Pencapaian

Rasio Pencapaian (%)	Nilai	Keterangan
≥ 100	100	Sangat Baik
50 – 99	80	Baik
26 – 50	70	Cukup
0 – 25	60	Kurang Baik
< 0	50	Tidak Baik

Untuk perhitungan *expected* PNBP, penelitian ini menggunakan regresi sederhana untuk melakukan permodelan dengan memanfaatkan data analisis pada aplikasi Ms. Excel. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel yang akan diteliti, yaitu antara variabel independen berupa variabel per sektor usaha pada PDRB (Y) dengan variabel dependen berupa realisasi PNBP K/L (Y). Penelitian ini dilakukan pada Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengelola PNBP di pusat dan memiliki Satuan Kerja (Satker) baik di pusat ataupun wilayah/daerah.

Gambar 3.1 Alur Proses Aplikasi **Amplify**



Langkah awal untuk mengetahui pengaruh variable sektor usaha Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional pada masing-masing Kementerian/Lembaga digunakan model ekonometrika dengan pemodelan panel data sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots$$

Dimana :

Y : Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional *Expected (Variable Dependent)*

X : Variable PDRB sektor usaha *(Variable Independent)*

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi Variabel Independen

i : Menunjukkan K/L Tertentu

t : Menunjukkan Tahun/ Periode Tertentu

Dari model tersebut akan didapatkan nilai PNBP *Expected* Kementerian/Lembaga tertentu pada tahun tertentu. Untuk menilai kinerja PNBP Fungsional pada Kementerian/Lembaga digunakan Metode Penilaian Kinerja. Hipotesa awal adalah tidak semua sektor lapangan usaha pada PDRB akan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PNBP suatu KL. Dengan demikian akan terdapat model sejumlah KL PNBP yang akan digunakan untuk menghitung realisasi PNBP yang diharapkan sesuai data PDRB periode tertentu (*Expected* PNBP). Nilai *Expected* PNBP akan dibandingkan dengan realisasi PNBP yang tersedia

untuk menilai capaian PNBP suatu KL pada periode tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

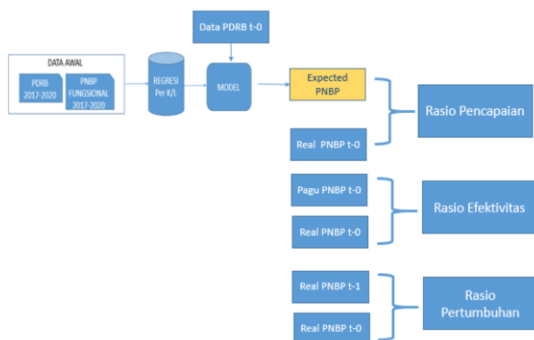
a. Pembuatan Spesifikasi Kebutuhan Aplikasi

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan informasi dari beberapa pegawai Bidang PA I Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menggali informasi terkait kebutuhan Bidang PA I terhadap tuisi Monev PNBP khususnya dalam hal penentuan target satker atau K/L yang akan dilakukan monev serta informasi-informasi yang diperlukan sebagai bahan untuk monev dan pelaporan hasil monev. Informasi yang didapat adalah belum terdapat standarisasi atau acuan dalam penentuan obyek monev dan pembinaan satker pengelola PNBP Fungsional.

b. Pembuatan Rancangan Aplikasi

Pada tahapan ini dilakukan perancangan aplikasi berupa *database*, antarmuka dan alur proses berdasarkan kebutuhan serta data input yang tersedia sehingga akan memudahkan dalam proses pengembangan perangkat lunak serta pengguna akhir aplikasi dalam mengoperasikannya. Output tahapan ini berupa alur proses aplikasi, *usecase diagram* dan *activity diagram*.

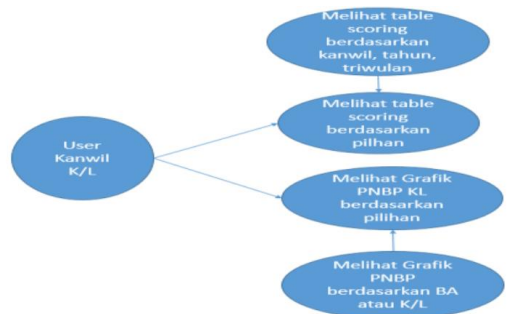
Gambar 4.1 Alur Proses Pembobotan



Tabel 4.1 Tabel Pembobotan

BA atau K/L	Rasio Pencapaian	Rasio Efektifitas	Rasio Pertumbuhan	Total nilai
A	11	11	11	111
B	22	22	22	222
C	33	33	33	333
...

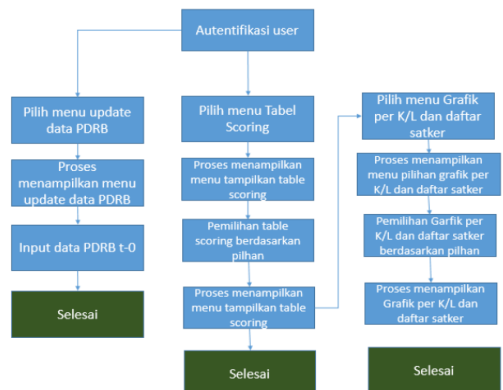
Gambar 4.2 Use Case Diagram



Secara singkat berikut adalah kebutuhan dari aplikasi yang dibuat :

1. Pengguna adalah pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan, satker dan Kementerian/Lembaga.
2. Aplikasi berbasis *web* dan dapat diakses secara *online*.
3. Aplikasi dapat menampilkan *table scoring*/pembobotan capaian PNBP Kementerian/Lembaga berdasarkan Kanwil DJPb, Tahun, dan Triwulan.
4. Aplikasi dapat menampilkan lebih detail berupa Grafik bar berdasarkan Kementerian/Lembaga, serta Daftar Satuan Kerja di lingkup Kanwil DJPb dari pilihan sebelumnya.

Gambar 4.3 Activity Diagram



c. Pembuatan Aplikasi

Untuk tahapan pembuatan aplikasi terdiri dari beberapa tahapan antara lain, tahapan pengumpulan data awal, tahapan *cleansing data*, tahapan permodelan, tahapan pembuatan *database* serta pembangunan sistem.

1. Tahapan Pengumpulan Data Awal

Data awal yang dibutuhkan adalah Data PDRB yang dirilis oleh BPS tiap-tiap provinsi. Secara spesifik data yang ditarik adalah Data PDRB per sektor Lapangan Usaha atas dasar harga konstan triwulanan. Data berikutnya adalah data PNBP yang diperoleh dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (Dit. SITP).

2. Tahapan *Cleansing Data*

Data PDRB selanjutnya dikompilasi dan disusun menjadi sebuah *database* yang siap olah baik untuk tahapan permodelan maupun untuk aplikasi. Sedangkan untuk data PNBP yang diperoleh dari Dit. SITP, perlu dilakukan mapping akun dengan menghapus data PNBP Umum untuk menghasilkan data bersih berupa Data PNBP Fungsional yang merujuk pada Bagian Anggaran atau Kementerian/lembaga tertentu. Dari hasil *cleansing data* dipastikan terdapat 10 (sepuluh) K/L yang memiliki realisasi PNBP Fungsional di daerah yang jumlah data nya dirasa cukup untuk dapat dilakukan permodelan.

Kementerian/Lembaga tersebut antara lain:

Tabel 4.2 Tabel Kementerian/Lembaga

No	Kode Kementerian Negara / Lembaga	Nama Kementerian Negara / Lembaga
1	005	Mahkamah Agung
2	006	Kejaksaan Republik Indonesia
3	015	Kementerian Keuangan
4	018	Kementerian Pertanian
5	019	Kementerian Perindustrian
6	022	Kementerian Perhubungan
7	024	Kementerian Kesehatan
8	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan
10	060	Kepolisian Republik Indonesia

3. Tahapan Permodelan

Tahapan ini bertujuan membuat model/formula yang akan digunakan untuk membentuk data "*expected PNBP*". Regresi digunakan untuk melakukan permodelan dengan memanfaatkan data analisis pada aplikasi *Ms. Excel*. Regresi ini dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel variabel independen berupa variable per sektor usaha pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Y) dengan variabel dependen berupa PNBP Fungsional (Y).

Hasil Regresi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Hasil Regresi 10 Kementerian/Lembaga

No	Kementerian Negara / Lembaga	Variabel Determinan	Coefficient	R ²
1	Kementerian Pertanian	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	49,7615918	0,965263374
		Pertambangan dan Penggalian	33,71479826	
		Industri Pengolahan	-61,20061267	
		Pengadaan Listrik dan Gas	2988,45774	
		Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4196,272958	
		Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	288,8624553	
		Transportasi dan Pergudangan	-436,1753198	
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	192,8627143	
		Jasa Keuangan dan Asuransi	-400,126798	
		Jasa lainnya	-456,6057359	
2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pertambangan dan Penggalian	-822,5521558	0,945605415
		Pengadaan Listrik dan Gas	53082,86393	
		Konstruksi	13901,20494	
		Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4459,927279	
		Jasa Keuangan dan Asuransi	-44677,09171	
		Real Estat	-16522,13925	
		Jasa Perusahaan	83398,37304	
		Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-15752,42971	
		Jasa Pendidikan	9660,101099	
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	49637,87024	
3	Kementerian Perhubungan	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2567,358745	0,766799694
		Pertambangan dan Penggalian	3123,655215	
		Industri Pengolahan	-1868,309456	
		Pengadaan Listrik dan Gas	154837,6618	
		Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	128591,1911	
		Transportasi dan Pergudangan	7934,724593	
		Jasa Keuangan dan Asuransi	-13891,08433	
		Real Estat	-18410,40221	
		Jasa Perusahaan	46424,65257	
		Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-23719,24957	
4	Kementerian Kesehatan	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5071,98742	0,787494672
		Pertambangan dan Penggalian	330,3676113	
		Industri Pengolahan	-1091,276466	
		Real Estat	-536,3158294	
		Jasa Perusahaan	1948,408419	
		Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-792,5410137	
		Jasa Pendidikan	498,7718623	
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2422,5452	
		Jasa lainnya	-613,2377558	
		Jasa lainnya	-613,2377558	
5	Kementerian Keuangan	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-21820,02446	0,68473449
		Industri Pengolahan	49666,33805	

		Pengadaan Listrik dan Gas	-2722669,73	
		Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3803353,611	
		Konstruksi	-218115,1582	
		Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30965,74646	
		Transportasi dan Perhubungan	-95649,02613	
		Jasa Keuangan dan Asuransi	663814,2906	
		Real Estat	168768,0322	
		Jasa Perusahaan	-426677,7509	
		Jasa Pendidikan	-559696,8741	
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1731168,612	
		Jasa lainnya	-389374,8199	
6	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-140,1390245	0,578699796
		Pertambangan dan Penggalian	71,27411488	
		Industri Pengolahan	-31,62354157	
		Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-6788,523041	
		Konstruksi	225,5530941	
		Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	260,1616999	
		Transportasi dan Perhubungan	-314,2706831	
		Jasa Keuangan dan Asuransi	-936,1714032	
		Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2118,874559	
		Jasa Pendidikan	-1561,876323	
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2247,730836	
		Jasa lainnya	595,7330671	
7	Kejaksaan Republik Indonesia	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-149,9683974	0,662362935
		Industri Pengolahan	-101,1770471	
		Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-16442,3246	
		Konstruksi	846,1492543	
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	297,2763167	
		Jasa Perusahaan	-1069,92754	
		Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	601,4306257	
		Jasa Pendidikan	868,168834	
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-4718,000012	
		Jasa lainnya	1712,086179	
8	Kementerian Perindustrian	Pengadaan Listrik dan Gas	-5775,617134	0,748709341
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	125,2619461	
		Jasa Keuangan dan Asuransi	202,4908015	
		Jasa Perusahaan	-516,0920013	
		Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	242,7747315	
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-427,243111	
		Jasa lainnya	1059,815664	
9	Mahkamah Agung	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,310785662	0,617972328
		Industri Pengolahan	0,739274218	
		Pengadaan Listrik dan Gas	-14,53330013	
		Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	40,96370924	
		Konstruksi	-1,307725821	
		Transportasi dan Perhubungan	2,461502652	
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,861820529	
		Jasa Keuangan dan Asuransi	-3,192279715	
		Jasa Perusahaan	4,072534517	
		Jasa Pendidikan	3,238561503	
		Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,217772766	
		Jasa lainnya	-4,272452974	
10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Industri Pengolahan	-77,32711675	0,937988517
		Jasa Keuangan dan Asuransi	2543,703337	
		Jasa Perusahaan	1355,663498	
		Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2113,112716	

4. Tahapan Pembuatan Database

Database utama aplikasi antara lain:

- data PBRB per sektor lapangan usaha atas dasar harga berlaku periode 2017-2020 (triwulanan). Data ini akan *diupdate* secara triwulanan oleh Kanwil DJPb dari data rilis BPS setempat.
- Data pagu dan realisasi PNPB. Data ini akan *diupdate* secara otomatis dari hasil *mirroring* data OMSPAN

c. Data model "*expected* PNPB". Data ini cukup dibuat sekali pada saat pengembangan. Pembaharuan formulasi permodelan dapat dilakukan oleh Kantor Pusat DJPb apabila diperlukan.

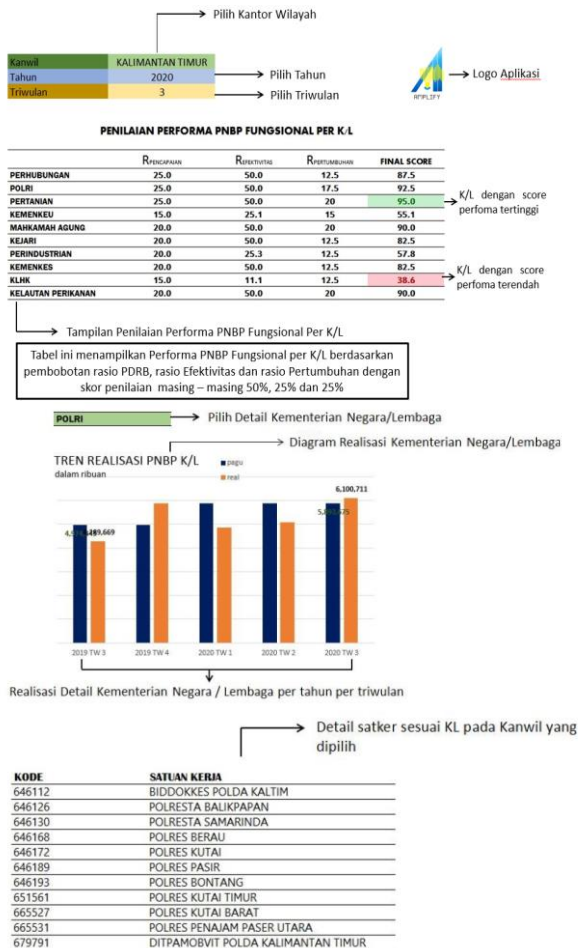
5. Tahapan Pembangunan Sistem Aplikasi

Tahapan ini adalah tahapan pembuatan sistem aplikasi yang dilakukan berdasarkan desain yang telah dibuat pada tahapan perancangan sistem (tahap elaborasi). Pada fase ini dilakukan implementasi dari desain yang diterjemahkan dalam kode pemrograman. *Output* dari tahapan ini adalah aplikasi versi beta.

d. Pengujian Aplikasi

Pada tahapan ini, aplikasi versi beta diuji untuk memastikan menu-menu, fungsi-fungsi yang tersedia telah berjalan sesuai dengan desain yang telah disusun pada fase elaborasi. Pengujian dilakukan dengan metode *Black-box* dimana pengecekan menu-menu aplikasi sebagai sebuah peralatan yang diharapkan memiliki input dan output tertentu, namun proses internal tidak dapat diketahui (mirip seperti *black box*) (Di Lucca, 2006). *Output* tahapan ini adalah aplikasi yang telah *final* dan sesuai dengan tahapan perancangan. Selain itu, dalam tahapan ini disiapkan pula rencana-rencana penambahan fitur untuk rancangan versi berikutnya.

Gambar 4.4 Aplikasi **Amplify**



KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Aplikasi Monev PNBP Fungsional Kementerian/Lembaga merupakan aplikasi berbasis *web/online* yang disusun oleh Tim Pengembang dari Ditjen Perbendaharaan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan berperan sebagai pengguna utama yang memanfaatkan aplikasi ini dalam menentukan satker pengelola PNBP Fungsional di wilayah kerjanya, yang perlu dilakukan monev dan pembinaan serta mendalami atas informasi awal yang telah disediakan oleh aplikasi.

Sebagai unit yang memiliki tuisi monev PNBP, Kanwil DJPb khususnya Bidang PA I akan sangat terbantu dengan aplikasi ini yang dapat menjadi acuan dasar pelaksanaan monev PNBP.

Lebih lanjut, pengguna aplikasi ini dapat diperluas, yakni Kementerian/Lembaga agar dapat mengevaluasi kinerja PNBP satuan kerja dibawah K/L terkait secara mandiri dan berkala. Informasi yang dihasilkan dapat membantu untuk menganalisis capaian PNBP periode tertentu, potensi dan memberikan masukan kemungkinan adanya perbaikan tarif serta target PNBP tahun berikutnya.

Keterbatasan dalam pembuatan aplikasi ini adalah ketersediaan data PDRB per lokasi/kabupaten/kota secara triwulanan. Apabila ketersediaan data ini dapat dikoordinasikan dengan BPS setempat maka aplikasi dapat dikembangkan lebih jauh hingga evaluasi capaian PNBP per Satuan Kerja dapat dimunculkan. Dengan demikian, pengguna aplikasi akan mendapatkan gambaran yang lebih luas lagi terkait capaian PNBP di wilayah kerja masing-masing untuk selanjutnya dilakukan analisa perbaikan, evaluasi, penyesuaian tarif dan usulan target tahun berikutnya. Keterbatasan lainnya adalah data mapping akun PNBP Fungsional yang masih dilakukan secara manual. Perlu sinergi lebih lanjut dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-DJPb serta Direktorat PNBP-DJA untuk dapat menyediakan data akun PNBP Fungsional yang lebih valid. Selain itu, penyempurnaan model dapat dilakukan untuk menghasilkan Rasio Pencapaian yang lebih menggambarkan capaian PNBP.

Usulan pengembangan dan kajian selanjutnya adalah pemanfaatan konsep yang sama untuk evaluasi BLU, dengan menambahkan pada sistem pembobotan, Rasio Efisiensi yang telah dikembangkan pada DDAC 2021 oleh Tim Dit. PPK BLU.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia (1997). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
- Republik Indonesia (2018). *Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147. Jakarta.
- Republik Indonesia (2021). *Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Perindustrian*. Jakarta.
- Republik Indonesia (2021). *Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Perikanan*. Jakarta.
- Republik Indonesia (2019). *Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan*. Jakarta.
- Republik Indonesia (2019). *Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan*. Jakarta.
- Republik Indonesia (2019). *Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung*. Jakarta.
- Republik Indonesia (2019). *Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Kesehatan*. Jakarta.
- Republik Indonesia (2019). *Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM)*. Jakarta.
- Republik Indonesia (2016). *Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Perhubungan*. Jakarta.
- Republik Indonesia (2016). *Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Pertanian*. Jakarta.
- Republik Indonesia (2016). *Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan Negeri*. Jakarta.
- Republik Indonesia (2016). *Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Luar Negeri*. Jakarta.
- Republik Indonesia (2014). *Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Pertanahan*. Jakarta.

- Republik Indonesia (2014). *Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Pertahanan*. Jakarta.
- Republik Indonesia (2014). *Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- Republik Indonesia (1997). *Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta.
- Republik Indonesia (1999). *Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan PNBPN yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu*. Jakarta.
- Menteri Keuangan (2021). *Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. PMK Nomor 155/PMK.02/2021*. Jakarta.
- Menteri Keuangan (2016). *Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan PMK Nomor 262/PMK.01/2016*. Jakarta.
- Azizah Ulfah,dkk. (2021). *Kendaraan Bermotor Penopang PNBPN Kepolisian, Budget Issue Brief Vol 01,Ed 14*., Jakarta : PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI.
- Badan Pusat Statistik (2020). *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020*. Jakarta : CV Nario Sari.
- Giuseppe A. Di Lucca, A. R. (2006). *Testing Web-based applications: The state of the art and future trends*. Information and Software Technology 48, 1172-1186.
- Imam Khadiqotul Il'mi. (2020). *Penundaan Kewajiban Pembayaran PNBPN Kemenkominfo: (Un)Blessing in Disguise, Buletin Inti PNBPN Edisi 2*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
- Mahmudi. (2010). *Analisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi kedua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Nova Aulia Bella,Riza Aditya Safri. (2021). *Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor PNBPN Kementerian ATR/BPN, Budget Issue Brief Vol 01,Ed 10*., Jakarta : PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI.

Buku

- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Aneka Cipta.
- Agung Yuniarta. (2012). *Modul Pengelolaan PNBPN*. ([ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/modul.../Modul pengelolaan PNBPN](ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/modul.../Modul%20pengelolaan%20PNBPN), diakses pada 19 Februari 2022).
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Roby Alexander Sirait, dkk. (2021). *Strategi Pemerintahan Untuk Mendorong Investasi Perikanan, Budget Issue Brief Vol 02,Ed 1*., Jakarta : PUSAT KAJIAN

ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI.

Saragih, Juli Panglima. (2003). *Disentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sudaryono, Y., Sjarif, D., Sofiati, N.A. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Ulum MD, I. (2012). *Audit Sektor Publik. Edisi Pertama Cetakan Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

Abdullah Muid. (2015). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Gresik Tahun 1994-2013)*. Malang : Universitas Brawijaya.

Andriani, E & Handayani. (2018). *Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Aceh*. Aceh : Universitas Malikussaleh Aceh.

Eliza Noviriani. (2017). *Determinan Penerimaan dan Belanja Daerah: Studi Pada 10 Provinsi di Indonesia, Indonesian Treasury Review*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Desi Rosalina. (2016). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Penerimaan Pajak*. Jakarta : ABFI Institut Perbanas.

R. Erman Jaya Kusuma. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Pengelolaan Penerimaan*

Negara Bukan Pajak Basis Layanan Pada Kementerian/Lembaga Jurnal Good Governance Volume 17 No. 2. Jakarta : Pusat Pendidikan Latihan Keuangan Anggaran Dan Perbendaharaan Jakarta.

Fikry Nugraha Ramadhan. (2020). *Analisis Kemandirian, Efektivitas, Dan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Barat*. Makassar : Universitas Negeri Makassar.

Hijri Juliansyah. (2018). *Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeuleu, Jurnal Ilmiah Universitas Malikussaleh Jambi*. Jambi : Universitas Batanghari Jambi.

Juliansyah, H. & Sulkadria. (2018). *Pengaruh Total Penduduk Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue: Jurnal Ekonomi Regional Unimal, 1(2)*. Jakarta.

Mourre, G. & Reut, A. (2018). *Non-tax revenue in the European Union: A source of fiscal risk? International tax and public finance*. [Online] 26 (1), 198–223.

Kartika, D., Setiawan, A. B., & Kusuma, I. C. (2016). *Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Sosial Humaniora, 7.

Malawati. (2020). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perhitungan*

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jurnal Sylva Scientiae Vol. 03 No. 6. Kalimantan Selatan : Universitas Lambung Mangkurat.

Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mu'min Mubarak. (2014). *Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

Nursanti, Masdar Mas'ud, Nur Alam. (2019). *Efektivitas dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Study Kasus pada Kantor Pertanahan Kota Makassar Tahun 2015–2018)*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 2 No. 4. 97-109. Makassar.

Rahmanta Ginting. (2012). *Pengaruh Produk Domestik Bruto Dan Sbi Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia.

Sayadi, M.H. (2021). *APBN 2020: Analisis Kinerja Pendapatan Negara Selama Pandemi Covid-19: Indonesian Treasury Review*, 6(2), 1-13. Jakarta.

Triani & Kuntari, Y. (2010). *Pengaruh Variabel Makro terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar: Aset*, 12(1), 87-94. Jawa Tengah.

Welly Freddi. (2016). *Hubungan produk domestik bruto dengan penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai Indonesia*

periode 2000.II-2006.IV. Jakarta : Perpustakaan Universitas Indonesia

Yunica Safitri, dkk. (2014). *Performance And Added Value of CocoFiber Agroindustry In Kawasan Usaha Agroindustri Terpadu (KUAT) At Pesisir Selatan Sub-District of Pesisir Barat District*. Lampung: Universitas Lampung.

Website/Artikel

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Aceh tahun 2017- 2021*. (<https://aceh.bps.go.id/>) diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Sumatera Utara tahun 2017- 2021*. (<https://sumut.bps.go.id/>) diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Sumatera Barat tahun 2017- 2021*. (<https://sumbar.bps.go.id/>) diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Riau Tahun 2017- 2021*. (<https://riau.bps.go.id/>) diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Riau Tahun 2017- 2021*.

(<https://riau.bps.go.id/>) diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Jambi Tahun 2017- 2021*. (<https://jambi.bps.go.id/>) diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017- 2021*. (<https://sumsel.bps.go.id/>) diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Bengkulu Tahun 2017- 2021*. (<https://bengkulu.bps.go.id/>) diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Lampung Tahun 2017- 2021*. (<https://lampung.bps.go.id/>) diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017- 2021*. (<https://babel.bps.go.id/>) diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Banten Tahun 2017- 2021*. (<https://banten.bps.go.id/>) diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan*

Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017- 2021. (<https://jatim.bps.go.id/>) diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Yogyakarta Tahun 2017- 2021*. (<https://yogyakarta.bps.go.id/>) diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017- 2021*. (<https://jateng.bps.go.id/>) diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017- 2021*. (<https://jabar.bps.go.id/>) diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017- 2021*. (<https://jakarta.bps.go.id/>) diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017- 2021*. (<https://kepri.bps.go.id/>) diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017- 2021*.

(<https://kaltara.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021*.

(<https://kaltim.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017- 2021*.

(<https://kalsel.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017- 2021*.

(<https://kalteng.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017- 2021*.

(<https://kalbar.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2021*.

(<https://ntt.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2021*.

(<https://ntb.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Bali Tahun 2017- 2021*.

(<https://bali.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017- 2021*.

(<https://sulut.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017- 2021*.

(<https://sulteng.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017- 2021*.

(<https://sulbar.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017- 2021*.

(<https://sulsel.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017- 2021*.

(<https://sultral.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2021*. (<https://malut.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Maluku Tahun 2017-2021*. (<https://maluku.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Gorontalo Tahun 2017-2021*. (<https://gorontalo.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Maluku Tahun 2017-2021*. (<https://maluku.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta)*

Provinsi Papua Tahun 2017-2021. (<https://papua.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022)

Badan Pusat Statistik (2022). *PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta) Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2021*. (<https://papuabarat.bps.go.id/> diakses pada 15 Februari 2022)

Kementerian Keuangan (2022). *Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 Triliun, Lampau Target APBN 2021*. (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/> diakses pada 4 Januari 2022)

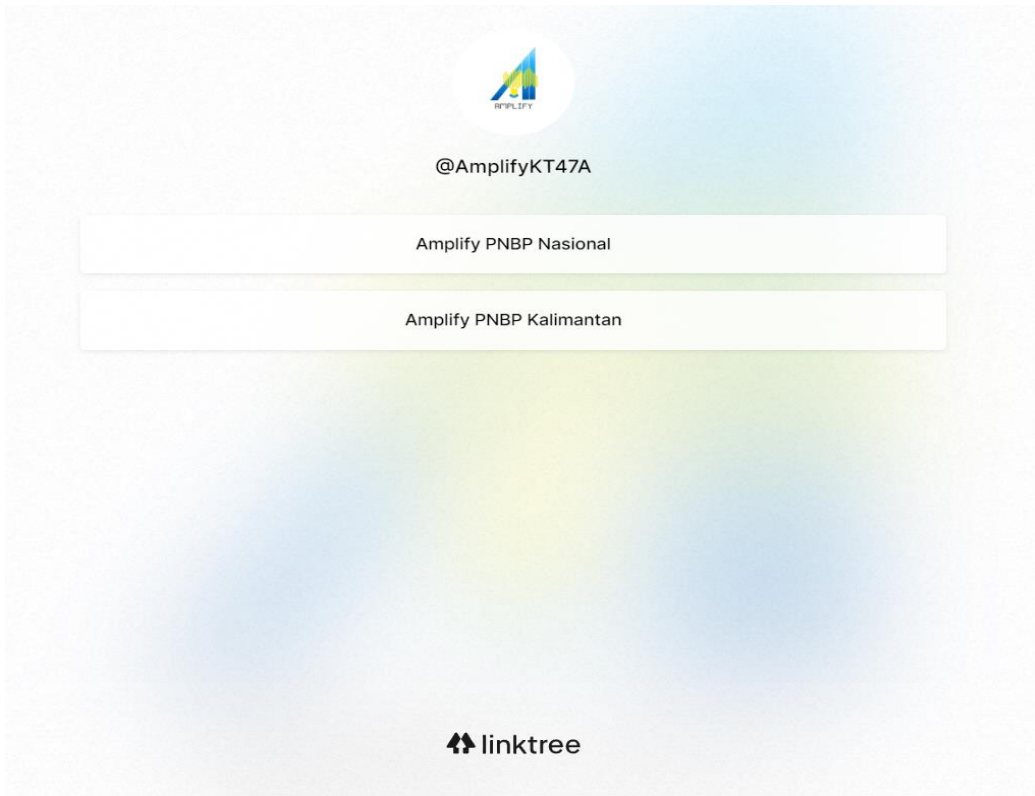
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2022). *Tugas dan Fungsi Ditjen Perbendaharaan*. (<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/profil/profil-organisasi/tugas-dan-fungsi.html/> diakses pada 2 Maret 2022)

LAMPIRAN

LAMPIRAN APLIKASI AMPLIFY

(Aplikasi dapat diakses pada <https://linktr.ee/AmplifyKT47A>)

Tampilan Dashboard



QR Dashboard Aplikasi Amplify



Aplikasi Amplify Wilayah Kalimantan

KALIMANTAN TIMUR

Tahun 2020

Triwulan 4

PENILAIAN PERFORMA PNPB FUNGSIONAL PER K/L

	REPERSITIVITAS	REPERSUMBUHAN	REPENCARIAN	FINAL SCORE
PERHUBUNGAN	50	15	20	85.0
POLRI	50	21	20	91.0
PERTANIAN	50	24	20	94.0
KEMENKEU	36	15	12	62.6
MAHKAMAH AGUNG	50	18	16	84.0
KEJARI	50	15	20	85.0
PERINDUSTRIAN	46	15	20	80.6
KEMENKES	50	15	16	81.0
KLHK	50	21	12	83.0
KELAUTAN PERIKANAN	50	24	14	88.0

KLHK

Aplikasi Amplify Nasional (10 Kementerian/Lembaga)

BENGKULU

Tahun 2021

Triwulan 1

PENILAIAN PERFORMA PNPB FUNGSIONAL PER K/L

	REPERSITIVITAS	REPERSUMBUHAN	REPENCARIAN	FINAL SCORE
PERHUBUNGAN	50.0	21	12	83.0
POLRI	37.2	30	20	87.2
PERTANIAN	50.0	21	12	83.0
KEMENKEU	24.1	30	12	66.1
MAHKAMAH AGUNG	50.0	18	20	88.0
KEJARI	50.0	18	12	80.0
PERINDUSTRIAN	0.0	30	12	42.0
KEMENKES	50.0	18	12	80.0
KLHK	16.9	18	12	46.9
KELAUTAN PERIKANAN	23.1	18	12	53.1

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN DATA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
BALIKPAPAN**

GD. KEUANGAN NEGARA LANTAI 1, JALAN AHMAD YANI NO. 28, BALIKPAPAN 76113;
TELEPON (0542) 421820, 421840; FAKSIMILE 0542-731284; LAMAN
WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/BALIKPAPAN

Nomor : S-364/KPN.2002/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Data

02 Februari 2022

Yth. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sehubungan dengan kegiatan analisis belanja negara dan penerimaan negara bukan pajak di unit kami, kami membutuhkan data-data sebagai sumber penyusunan model untuk memperdalam kajian dan analisis dimaksud sebagai berikut:

1. PDRB Harga Konstan **per Kab/kota per lapangan usaha** periode 2017-2020
2. PDRB Harga Berlaku **per Kab/Kota per lapangan usaha** periode 2017-2020

Mohon kiranya kami dapat memperoleh data di atas. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Balikpapan



Ditandatangani secara elektronik
Adi Nugroho

Nomor : B-219-0/03200/PK.320/02/2022
Lampiran : 1 (Satu) Set
Perihal : Permohonan Data

Jakarta, 11 Februari 2022

Kepada Yth,
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1
Balikpapan
di
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Balikpapan Nomor : S-364/KPN.2002/2022 perihal permohonan data, kami sampaikan bahwa data PDRB menurut lapangan usaha tahun 2017-2020 menurut kabupaten/kota sudah pernah kami serahkan kepada walidata Kementerian Keuangan dalam hal ini yaitu Pusat Sistem Informasi Teknologi Keuangan (Pusintek). Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, silahkan berkoordinasi dengan Pusintek terkait permintaan data PDRB tingkat Kabupaten/Kota karena data yang diminta tersebut sudah tersedia di Pusintek.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Direktur Diseminasi Statistik



Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, S.Si, M.Si
NIP. 196606141989012001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
BALIKPAPAN

GD. KEUANGAN NEGARA LANTAI 1, JALAN AHMAD YANI NO. 28, BALIKPAPAN 76113;
TELEPON (0542) 421820, 421840; FAKSIMILE 0542-731284; LAMAN
WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/BALIKPAPAN

Nomor : S-443/KPN.2002/2022
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Permohonan Permintaan Data

15 Februari 2022

Yth. Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

Sehubungan dengan surat Direktur Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Nomor B-219-0/03200/PK.320/02/2022 hal Permohonan Data dan pelaksanaan kegiatan DJPb Data Analytic Competition (DDAC) 2022, disampaikan hal-hal berikut :

1. Kami telah bersurat kepada Direktur Diseminasi Statistik Badan Pusat dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Nomor S-364/KPN.2002/2022 perihal permohonan data
2. Adapun surat tersebut sudah mendapat balasan dari Direktur Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Nomor B-219-0/03200/PK.320/02/2022 hal Permohonan Data dimana disampaikan bahwa untuk permintaan data dimohon untuk dapat berkoordinasi dengan Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon saudara dapat mengirimkan data-data yang kami perlukan agar kegiatan dapat berjalan. Data yang kami perlukan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat Kabupaten Kota dari periode 2017- 2021 secara triwulan.

Atas bantuan dan kerjasama kami sampaikan terima kasih

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Balikpapan



Ditandatangani secara elektronik
Adi Nugroho

LAMPIRAN HASIL REGRESI KEMENTERIAN/LEMBAGA

MAHKAMAH AGUNG

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,78611216
R Square	0,617972328
Adjusted R Squ	0,610432309
Standard Error	15151110,62
Observations	621

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	12	2,2577E+17	1,88142E+16	81,95897916	1,8732E-118
Residual	608	1,3957E+17	2,29556E+14		
Total	620	3,6534E+17			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>
Intercept	446944,5278	1111704,797	0,402035261	0,687799366	-1736302,943	2630191,999
1	-0,310785662	0,139088515	-2,234445185	0,025816418	-0,583937895	-0,037633429
3	0,739274218	0,101072451	7,314299898	8,203E-13	0,54078072	0,937767715
4	-14,53330013	5,068352485	-2,867460416	0,004281206	-24,48690272	-4,579697533
5	40,96370924	13,64571284	3,001947185	0,002792662	14,16525686	67,76216161
6	-1,307725821	0,399224531	-3,27566499	0,001114081	-2,091752256	-0,523699385
8	2,461502652	0,574795863	4,282394516	2,14845E-05	1,33267635	3,590328955
9	-0,861820529	0,342215429	-2,518356735	0,012045978	-1,533888304	-0,189752754
11	-3,192279715	1,384206276	-2,306216761	0,021433968	-5,910685591	-0,473873838
13	4,072534517	1,678539182	2,426237385	0,015546088	0,776096077	7,368972956
15	3,238561503	1,060381959	3,054146175	0,002355752	1,156105588	5,321017418
16	8,217772766	2,55479865	3,216602908	0,001366058	3,200471674	13,23507386
17	-4,272452974	1,434980123	-2,977360386	0,003023145	-7,090572258	-1,454333691

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,813856827
R Square	0,662362935
Adjusted R Square	0,656827901
Standard Error	4304961613
Observations	621

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	10	2,21776E+22	2,22E+21	119,6674	1,0857E-136
Residual	610	1,13049E+22	1,85E+19		
Total	620	3,34825E+22			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>
Intercept	598563389,9	376447407,8	1,590032	0,112346	-140726823,5	1337853603
1	-149,9683974	35,69277136	-4,20165	3,05E-05	-220,064023	-79,87277176
3	-101,1770471	22,95672453	-4,40729	1,24E-05	-146,2608528	-56,09324141
5	-16442,3246	3727,837307	-4,41069	1,22E-05	-23763,27723	-9121,371977
6	846,1492543	113,3984771	7,461734	2,95E-13	623,4504587	1068,84805
9	297,2763167	98,88442523	3,006301	0,002753	103,0810949	491,4715384
13	-1069,92754	212,9464597	-5,0244	6,64E-07	-1488,124691	-651,7303881
14	601,4306257	299,4912535	2,008174	0,045065	13,27156769	1189,589684
15	868,168834	279,5024861	3,106122	0,001984	319,2649278	1417,07274
16	-4718,000012	647,4006628	-7,2876	9,81E-13	-5989,404634	-3446,59539
17	1712,086179	389,6761701	4,393613	1,31E-05	946,8165212	2477,355837

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**SUMMARY OUTPUT**

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,9684981
R Square	0,9379885
Adjusted R Square	0,9374844
Standard Error	6,74E+09
Observations	497

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	4	3,38027E+23	8E+22	1860,5	2,057E-295
Residual	492	2,23473E+22	5E+19		
Total	496	3,60374E+23			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	1,851E+09	585900536,4	3,159	0,0017	699709926	3E+09	699709926	3002061575
3	-77,32712	23,47060124	-3,29	0,0011	-123,442092	-31,2121	-123,4421	-31,212142
11	2543,7033	429,8776104	5,917	6E-09	1699,08094	3388,326	1699,0809	3388,32573
13	1355,6635	540,054822	2,51	0,0124	294,565211	2416,762	294,56521	2416,76178
14	-2113,113	310,993113	-6,79	3E-11	-2724,15116	-1502,07	-2724,151	-1502,0743

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**SUMMARY OUTPUT**

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,7607232
R Square	0,5786998
Adjusted R Square	0,570203
Standard Error	2,553E+09
Observations	608

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	12	5,32539E+21	4E+20	68,108	2,78E-103
Residual	595	3,87695E+21	7E+18		
Total	607	9,20234E+21			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	-3,63E+08	250719282	-1,45	0,1479	-855665348	129139422	-8,56E+08	129139422
1	-140,139	20,92254922	-6,7	5E-11	-181,23005	-99,048	-181,2301	-99,047996
2	71,274115	11,68029243	6,102	2E-09	48,3345	94,21373	48,3345	94,21373
3	-31,62354	15,66558924	-2,02	0,044	-62,390116	-0,856967	-62,39012	-0,8569669
5	-6788,523	2125,515713	-3,19	0,0015	-10962,949	-2614,097	-10962,95	-2614,0974
6	225,55309	72,66498142	3,104	0,002	82,842051	368,26414	82,842051	368,26414
7	260,1617	37,1904552	6,995	7E-12	187,12117	333,20223	187,12117	333,20223
8	-314,2707	92,60356742	-3,39	0,0007	-496,14029	-132,4011	-496,1403	-132,40108
11	-936,1714	112,5130059	-8,32	6E-16	-1157,1423	-715,2005	-1157,142	-715,20048
14	2118,8746	195,1314538	10,86	3E-25	1735,6444	2502,1047	1735,6444	2502,1047
15	-1561,876	164,0646532	-9,52	4E-20	-1884,0926	-1239,66	-1884,093	-1239,6601
16	2247,7308	427,8430856	5,254	2E-07	1407,4646	3087,9971	1407,4646	3087,9971
17	595,73307	223,0407661	2,671	0,0078	157,69015	1033,776	157,69015	1033,776

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0,972422
R Square	0,945605
Adjusted R Square	0,94443
Standard Error	5,28E+10
Observations	521

ANOVA

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	11	2,46242E+25	2E+24	804,41	0
Residual	509	1,41647E+24	3E+21		
Total	520	2,60406E+25			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95,0%	Upper 95,0%
Intercept	6,66E+09	6460414240	1,03	0,3034	-6,037E+09	1,93E+10	-6,037E+09	19347972756
2	-822,5522	267,5553225	-3,074	0,0022	-1348,2009	-296,9035	-1348,2009	-296,9034579
4	53082,86	17779,22457	2,986	0,003	18153,1673	88012,56	18153,1673	88012,56055
6	13901,2	1991,382958	6,981	9E-12	9988,86319	17813,55	9988,86319	17813,54669
7	-4459,927	901,2542143	-4,949	1E-06	-6230,5633	-2689,291	-6230,5633	-2689,29121
11	-44677,09	4842,061135	-9,227	7E-19	-54189,977	-35164,21	-54189,977	-35164,20627
12	-16522,14	2527,173523	-6,538	2E-10	-21487,114	-11557,16	-21487,114	-11557,16431
13	83398,37	5277,188326	15,8	5E-46	73030,6213	93766,12	73030,6213	93766,12483
14	-15752,43	4490,094225	-3,508	0,0005	-24573,828	-6931,031	-24573,828	-6931,030973
15	9660,101	3593,850637	2,688	0,0074	2599,49438	16720,71	2599,49438	16720,70782
16	49637,87	9119,860368	5,443	8E-08	31720,6684	67555,07	31720,6684	67555,07213
17	-3197,413	335,0723856	-9,542	6E-20	-3855,7082	-2539,118	-3855,7082	-2539,117968

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0,8652799
R Square	0,7487093
Adjusted R Square	0,7401703
Standard Error	784980009
Observations	214

ANOVA

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	7	3,782E+20	5E+19	87,681	2,7305E-58
Residual	206	1,2694E+20	6E+17		
Total	213	5,0514E+20			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95,0%	Upper 95,0%
Intercept	69077229	164769394	0,419	0,6755	-255773322	393927779	-255773322	393927779,1
4	-5775,617	979,672228	-5,9	2E-08	-7707,0867	-3844,148	-7707,0867	-3844,147617
9	125,26195	26,8110466	4,672	5E-06	72,4027164	178,12118	72,4027164	178,1211758
11	202,4908	74,7385644	2,709	0,0073	55,1402338	349,84137	55,1402338	349,8413692
13	-516,092	88,6395593	-5,82	2E-08	-690,84903	-341,335	-690,84903	-341,3349733
14	242,77473	75,587084	3,212	0,0015	93,7512678	391,7982	93,7512678	391,7981951
16	-427,2431	149,296357	-2,86	0,0046	-721,58785	-132,8984	-721,58785	-132,8983757
17	1059,8157	145,316325	7,293	6E-12	773,317748	1346,3136	773,317748	1346,313579

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**SUMMARY OUTPUT**

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,875671
R Square	0,7667997
Adjusted R Square	0,7608709
Standard Error	6,478E+10
Observations	485

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	12	6,51363E+24	5E+23	129,3	1,054E-140
Residual	472	1,98094E+24	4E+21		
Total	484	8,49457E+24			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	1,414E+10	6627343175	2,134	0,033	1116899046	2,72E+10	1,117E+09	27162393199
1	2567,3587	701,0873196	3,662	3E-04	1189,72029	3944,997	1189,7203	3944,997205
2	3123,6552	325,0710519	9,609	4E-20	2484,88973	3762,421	2484,8897	3762,420702
3	-1868,309	570,1382025	-3,277	0,001	-2988,6325	-747,986	-2988,6325	-747,9863616
4	154837,66	37733,7595	4,103	5E-05	80690,7234	228984,6	80690,723	228984,6002
5	128591,19	58177,65065	2,21	0,028	14271,9519	242910,4	14271,952	242910,4304
8	7934,7246	2690,39902	2,949	0,003	2648,08332	13221,37	2648,0833	13221,36587
11	-13891,08	6289,594546	-2,209	0,028	-26250,154	-1532,01	-26250,154	-1532,014209
12	-18410,4	3425,95425	-5,374	1E-07	-25142,411	-11678,4	-25142,411	-11678,39294
13	46424,653	8021,493151	5,788	1E-08	30662,3971	62186,91	30662,397	62186,90808
14	-23719,25	4867,274003	-4,873	2E-06	-33283,456	-14155	-33283,456	-14155,04313
15	24011,179	4869,689265	4,931	1E-06	14442,2268	33580,13	14442,227	33580,13168
17	-15070,22	6162,557287	-2,445	0,015	-27179,664	-2960,78	-27179,664	-2960,780765

KEMENTERIAN KESEHATAN**SUMMARY OUTPUT**

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,887409
R Square	0,7874947
Adjusted R Square	0,783346
Standard Error	2,818E+09
Observations	471

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	9	1,35629E+22	2E+21	189,8	6,544E-149
Residual	461	3,65994E+21	8E+18		
Total	470	1,72228E+22			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	459551659	279760255,5	1,643	0,101	-90211714	1,01E+09	-90211714	1009315032
5	5071,9874	1814,387586	2,795	0,005	1506,49225	8637,483	1506,4923	8637,482589
6	330,36761	59,53283371	5,549	5E-08	213,378258	447,357	213,37826	447,356965
11	-1091,2765	264,8073081	-4,121	4E-05	-1611,6555	-570,897	-1611,6555	-570,8974767
12	-536,31583	100,7696775	-5,322	2E-07	-734,34066	-338,291	-734,34066	-338,2909967
13	1948,4084	278,316518	7,001	9E-12	1401,48217	2495,335	1401,4822	2495,33467
14	-792,54101	209,9048696	-3,776	2E-04	-1205,0299	-380,052	-1205,0299	-380,0520813
15	498,77186	200,7260448	2,485	0,013	104,320452	893,2233	104,32045	893,2232732
16	2422,5452	498,0243614	4,864	2E-06	1443,86597	3401,224	1443,866	3401,224435
17	-613,23776	191,3000187	-3,206	0,001	-989,16586	-237,31	-989,16586	-237,3096478

KEMENTERIAN KEUANGAN**SUMMARY OUTPUT**

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,8274869
R Square	0,6847345
Adjusted R	
Square	0,6779825
Standard	
Error	8,934E+11
Observations	621

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	13	1,05222E+27	8E+25	101,41	1,463E-142
Residual	607	4,84464E+26	8E+23		
Total	620	1,53669E+27			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	-1,02E+11	74945848775	-1,362	0,1737	-2,493E+11	4,51E+10	-2,493E+11	45107471242
1	-21820,02	9730,224783	-2,242	0,0253	-40929,017	-2711,032	-40929,017	-2711,032104
3	49666,338	7170,731303	6,926	1E-11	35583,8834	63748,79	35583,8834	63748,79274
4	-2722670	452948,3403	-6,011	3E-09	-3612205,8	-1833134	-3612205,8	-1833133,613
5	3803353,6	803801,4545	4,732	3E-06	2224784,13	5381923	2224784,13	5381923,088
6	-218115,2	25067,94611	-8,701	3E-17	-267345,59	-168884,7	-267345,59	-168884,724
7	30965,746	13536,76201	2,288	0,0225	4381,17236	57550,32	4381,17236	57550,32057
8	-95649,03	34725,38182	-2,754	0,0061	-163845,5	-27452,55	-163845,5	-27452,54862
11	663814,29	81689,59241	8,126	2E-15	503385,746	824242,8	503385,746	824242,8348
12	168768,03	45978,31005	3,671	0,0003	78472,1557	259063,9	78472,1557	259063,9087
13	-426677,8	100861,8882	-4,23	3E-05	-624758,38	-228597,1	-624758,38	-228597,1215
15	-559696,9	65103,46129	-8,597	7E-17	-687552,25	-431841,5	-687552,25	-431841,4986
16	1731168,6	151040,5328	11,46	1E-27	1434543,15	2027794	1434543,15	2027794,07
17	-389374,8	85285,24862	-4,566	6E-06	-556864,8	-221884,8	-556864,8	-221884,8389

KEMENTERIAN PERTANIAN**SUMMARY OUTPUT**

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,982478
R Square	0,965263
Adjusted R	
Square	0,964246
Standard	
Error	1E+09
Observations	493

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	14	1,32839E+22	9E+20	948,764	0
Residual	478	4,78044E+20	1E+18		
Total	492	1,3762E+22			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	2,84E+08	120067087,9	2,366	0,01838	48163597,5	5,2E+08	48163597,5	520012670
1	49,76159	11,90865075	4,179	3,5E-05	26,3618163	73,16137	26,3618163	73,16136733
2	33,7148	5,021329132	6,714	5,4E-11	23,8481915	43,58141	23,8481915	43,58140507
3	-61,20061	9,134522954	-6,7	5,9E-11	-79,149396	-43,2518	-79,149396	-43,25182979
4	2988,458	591,8497526	5,049	6,3E-07	1825,50892	4151,407	1825,50892	4151,406562
5	4196,273	1002,735521	4,185	3,4E-05	2225,95855	6166,587	2225,95855	6166,587363
7	288,8625	21,99878012	13,13	7,5E-34	245,636188	332,0887	245,636188	332,0887223
8	-436,1753	43,05562959	-10,13	5,6E-22	-520,77702	-351,574	-520,77702	-351,5736224
9	192,8627	33,2635647	5,798	1,2E-08	127,50183	258,2236	127,50183	258,2235989
11	-400,1268	101,0509468	-3,96	8,6E-05	-598,68577	-201,568	-598,68577	-201,5678242
12	171,1435	53,81874563	3,18	0,00157	65,39298	276,8941	65,39298	276,8941137
13	894,2407	126,59884	7,064	5,8E-12	645,481679	1143	645,481679	1142,999744
14	-496,5192	80,22575747	-6,189	1,3E-09	-654,15794	-338,88	-654,15794	-338,8804562
16	618,2624	180,3624694	3,428	0,00066	263,86111	972,6637	263,86111	972,6637081
17	-456,6057	106,672312	-4,28	2,3E-05	-666,21035	-247,001	-666,21035	-247,0011208